

**Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam**

Oleh:

Bintang Yusuf Wijaya 14321144

Mutia Dewi S.Sos..M.I.Kom.

NIDN 0520028302

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Naskah Publikasi

**Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Disusun oleh:

Bintang Yusuf Wijaya

NIM. 14321144

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada: 03 JAN 2019



Dosen Pembimbing Skripsi,

Mutia

Mutia Dewi S.Sos., M.I.Kom.

NIDN 0520028302

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Rufi Harjanto, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0529098201

Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Melakukan Perencanaan Program E-Government

Bintang Yusuf Wijaya

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII,
menyelesaikan studi pada tahun 2018

Mutia Dewi S.Sos..M.I.Kom.

Staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

ABSTRACT

The development of information technology has touched the Regional Government by establishing an E-Government program. In the Presidential Instruction Regulation No. 6 of 2001 concerning Telematics (Telecommunications, Media and Information) by stating that, the Government is required to use telematics technology to support the creation of good government. The Penajam Paser Utara District is no exception, which can still be considered as the New Regency. Penajam Paser Utara Regency is an expansion area of Paser Regency. Employees who work are still very unfamiliar with and understand the message because education or scientific level is not in line with what they get. In addition, this research will explain how the Penajam Paser Utara District Government is conducting an E-Government program

The method used is descriptive with a qualitative approach. The researcher tries to describe and observe the object under study based on the facts found in the field. Data and information obtained using informants as resource persons. This study also uses data collection techniques by conducting interviews, observation, and documentation.

The results of this study are four types of strategies carried out. First, the communication policy carried out by Penajam Paser Utara District has formulated this Regent Regulation No. 65 of 2017 stipulated on December 14, 2017 which discusses information disclosure. Second, communication planning is carried out in accordance with procedures such as selecting communicators, media, messages, audiences, and also feedback. Third, the Communication System carried out by several points is still not maximized as infrastructure is still relatively underdeveloped due to financial problems. Fourth, the implementation of communication in its implementation has been good in its implementation, such as the selection of communicators who have the strength and credibility, then the nature of the message that also has persuasive nature, the selection of electronic media, especially the internet and the popular network, the selection of audiences in accordance with the message, and giving feedback that was felt quite responsive.

Keywords: *E-Government, Strategy Communication, Planning, Institutions, social media.*

Pendahuluan

e-Government atau bisa kita panggil juga dengan elektronik teknologi yang dikelola oleh pemerintah telah dijalankan oleh negara – negara maju lain seperti Korea Selatan, Denmark, Prancis, Amerika Serikat, Swedia dan lain sebagainya. Pentingnya pengembangan dibidang komunikasi memunculkan idea bagi para praktisi humas untuk juga mengembangkan teknologi elektronik yang dimana nanti di kelola oleh pemerintah.

Salah satu tujuannya adalah untuk menjangkau dan memfasilitasi masyarakatnya untuk mengemukakan pendapat pribadi atau juga untuk memberi informasi bagi mereka yang membutuhkan (masyarakat). Tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat dunia kini hampir lebih dari separuhnya memiliki apa itu yang di namakan dengan Gadget yang memudahkan mereka dalam mencari informasi.

Data yang penulis peroleh dari Bereksa.com, Indonesia menempati posisi ke-29 dari 63 negara yang diteliti. Padahal, di tahun 2014 Indonesia berada di peringkat ke-32. Posisi Indonesia di tahun 2015 mengalahkan India dan China yang berada di urutan lebih bawah, masing-masing di nomor 35 dan 49.

Dalam data statistik lain index e-Government yang penulis dapat dari web-site kominfo adalah sebagai bagaimana kita lihat indonesia pada tahun 2012 menempati peringkat 7 dalam kawasan asia tengara di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunai Darusalam. Dalam artian pemanfaatan e-Gov di Indonesia masih kurang dalam mengembangkan dan memanfaatkan e-Gov di daerah – daerah .

Akhirnya presiden pun mengeluarkan kebijakan agar setiap kota dan kabupaten untuk dapat mempunyai e-Government tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secara cepat dan lugas untuk menghindari isu – isu yang beredar di masyarakat. Dengan kata lain dalam menepakan sebuah strategi transformasi yang baik dan efektif, pembentukan struktur serta penyimpanan dana juga harus diperhatikan Karena alam implementasi dari e-Government adalah tujuan utamanya.

Bagaimana Perencanaan e-Gov yang di bangun oleh humas harus di mengerti masyarakat baik itu individu yang bekerja di pemerintahan atau individu yang bekerja di luar pemerintah. Dalam program e-Gov ini pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengembangkan komunikasi publik dalam bentuk website serta akun - akun media sosial yang berbasis dengan internet. Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa dikatakan

sebagai Kabupaten yang masih baru terbentuk dan memang perlu adanya pembenahan dalam bidang – bidang pembangunan dan elektronik. Di zaman yang sangat berkembang sekarang pemanfaatan teknologi yang dapat dijumpai diberbagai tempat saakan – akan membuat masyarakat harus bertahan dan menyesuaikan diri pada teknologi tersebut.

A. Rumusan Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini memang benar-benar memanfaatkan apa yang dinamakan internet, perkembangan itu mulai masuk dalam ranah komunikasi, seperti perkembangan alat dalam menjangkau semua manusia. Menurut (Warsita, 2008: 32). IK adalah tempat dimana satu system dan metode dalam memperoleh, mendapat, mengambil, mengolah, menyimpan, mengorganisasikan, dan nantinya akan dimaknai. menurut (Lantip dan Rianto, 2011: 18). Teknologi informasi dianggap mempunyai mobilitas yang tinggi serta perkembangan yang sangat cepat sebagai ilmu pengetahuan teknologi informasi sangat membantu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya humas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan program kerja yang bernama smart city di dalam program tersebut pemerintah akan mengembangkan apa yang sudah negara lain kembangkan seperti E-government yang dimana fungsi dari e-Gov sendiri adalah sebagai fasilitas masyarakat dalam mendapat informasi dan juga menyampaikan pendapat. Perubahan sangat berpengaruh dengan struktur organisasi, manusia dan budaya (Indrajit, 2006 : 13).

Namun dalam implementasinya pemerintah kota dan humas kota masih di nilai kurang dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang adanya e-Gov tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis dapat adalah :

“Bagaimana strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan Perencanaan e-Gov di masyarakat?”

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan perencanaan e-Gov di masyarakat.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peluang dan hambatan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas

Komunikasi Dan Informatika dalam menjalankan program kerja e-Government.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis :

Pertama, Penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi penelitian-penelitian yang lain yang mempunyai kesamaan dalam membahas topik dan tema e-Government. *Kedua*, Untuk masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara agar bisa memahami dan selalu mengkoscek kembali informasi yang sedang hangat. *Ketiga*, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi program studi Ilmu Komunikasi agar dapat digunakan sebagai referensi. *Keempat*, Memberikan pembelajaran secara teoritis dalam membahas pengelolaan strategi pemerintah kota di Indonesia. *Kelima*, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah Kota dalam mengatasi dan menganalisa strategi komunikasi dalam bidang E-government.

2. Manfaat Praktis

Untuk pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar bisa memberikan pengertian lebih dalam implementasi di masyarakat pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Memberikan alasan bagaimana cara penerapan dan strategi dalam membangun dan menerapkan E-Government

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

“EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTA KOTA SURABAYA, MEDAN, BANJARMASIN, MAKASSAR, DAN JAYAPURA”. Ditulis Oleh Melkior N. N. Sitokdana (2015). Mahasiswa Pascasarjana Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Penelitian ini membahas dan mendeskripsikan mengenai beberapa pemanfaatan web Pemerintah Provinsi yang menyangkut dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang e-Government. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa terdapat data yang

menunjukkan angka kurang adanya interaksi kepada masyarakat, terlebih diperparah dengan ditemukannya data bahwa beberapa daerah yang mendapati kekurangan itu adalah provinsi yang ada dipulau Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penelitian ini juga menyimpulkan pembahasan dalam hal ini merupakan aspek transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update dan tahapan pencapaian. Dari Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Jayapura. Menyimpulkan pada urutan teratas Kota Surabaya memiliki tingkat kualitas e-Government yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kota-kota lain

Penelitian berikutnya merupakan penelitian yang di lakukan oleh Ayu Aditya Oktavya (2015). Penelitian ini berjudul PENERAPAN (ELECTRONIC GOVERNMENT) e-GOVERNMENT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN DI KOTA BONTANG. Jurnal Ilmu Pemeritahan, 2015 : 3 (3) : 1433 -1447.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ayu Aditya Oktavya melatar belakangi tentang kebijakan Inpres No.3 tahun 2003 yang membahas tentang bagaimana kebijakan serta startegi nasional dalam melakukan pengembangan e-Governmnet dalam lingkup Indonesia. Selain itu terdapat kegelisahan yang ditemukan oleh sang peneliti yakni dimana masyarakat Kota Bontang masih belum mengerti ataupun mengenal elektronik government. Yang memiliki subjek penelitina yakni Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang.

Kekurangan itu di karenakan partisipasi masyarakat yang masih di katakan kurang dalam pemanfaatan e-Gov sendiri hal ini menyebabkan masyarakat bersifat apatis terhadap perubahan teknologi dengan salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi khusus oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam memperkenalkan e-Gov. Peryataan kedua yang di dapat oleh peneliti adalah pada pemetaan sumber daya manusianya.

Pada umumnya sudah cukup baik dengan di adakannya anggaran yang di keluarkan pemerintah kota dalam mendukung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang. Namun dalam dukungan ini pemerintah pusat tidak mengutamakan atau memprioritaskan dalam mengembangkan elektronik government tersebut. Hal yang terakhir yang di simpulkan adalah dalam pelaksanaan elektronik government di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bontang masih di nilai kurang dalam hal sosialisasi yang

menyebabkan masyarakat berfikir apatis dan kurang terbuka terhadap keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian yang lain juga masih tentang e-Government di daerah Indonesia, jurnal penelitian dari teknologi informasi yang berjudul ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DESA BERBASIS WEB yang di tulis oleh Hartono, Dwiarno Utomo, dan Edy Mulyanto. Pascasarjana Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro. Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999.

Penelitian ini memiliki perumusan masalah. Pertama, perlunya system informasi yang dapat menyampaikan data-data serta peluang dari investasi yang di harapkan masalah yang lain adalah potensi desa untuk mengupdate data-data dalam mengambil kebijakan pembangunan oleh SKPD. Manfaat dari penelitian ini adalah mampu untuk memberikan manfaat dalam pengembangan wacana.

Adapun metode penelitian yang di dapat oleh sang penulis jurnal tersebut adalah jenis penelitian ini sendiri memiliki data primer dan data sekunder, yang berarti data yang langsung di ambil dari sumbernya yakni melakukan wawancara dalam kata lain penelitian ini juga bisa disebut penelitian kualitatif sumber yang telah diwawancarai adalah perangkat desa setempat. Data sekunder yang didapatkan oleh penulis ini juga berupa data dari buku-buku dan literature lain. Dengan pengumpulan data adalah metode kepustakaan, metode observasi, dan wawancara. Penelitian yang di lakukan di seragen dapat menyimpulkan bahwa dengan terbangunnya aplikasi e-gov untuk pemberdayaan pemerintah dan potensi desa berbasis wab salah satunya dengan data-data yang baik dan cepat dalam penginformasiaannya, yang kedua aplikasi e-gov untuk pemberdayaan pemerintah dapat diakses setiap saat secara online oleh pihak desa sendiri dengan penyediaan data yang di tunjukan selalu mutakhir.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang ditulis oleh Emilsyah Nur yang merupakan penelitian e-Government terletak di daerah kota Palu. Penelitian yang berjudul PENERAPAN E-GOVERNMENT PUBLIK PADA SETIAP SKPD BERBASIS PELAYANAN DI KOTA PALU. Balai Besar dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar, 2014.

Mengambil keresahan dari SKPD daerah Kota Palu karena pemerintah kota palu dalam menyampaikan pesan atau informasi selalu bersifat pemberian langsung dari pusat akibatnya dari beberapa informasi yang beredar tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengambil atau untuk dapat mengabil informasi yang diinginkan. Adapun penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Namun dalam meberikan informasi pemerintah Kota Palu tidak memfiltrasi informasi namun pemerintah Palu telah melakukan implementasi dari yang dihartap oleh instruksi presiden tentang e-Government. Kurangnya keseriusan dalam mendukung pelaksanaan e-government menghambat SDM dalam yang masih rendah dalam bidang pengembangannya. Serta masyarakat yang masih belum tersentuh sama sekali khususnya kualitas pelayanan di setiap SKPD Kota Palu.

a. Kajian Teori

Kebijakan e-Government oleh Pemerintah RI.

E-Government adalah sebuah bentuk dimana pelayanan public sudah terganti dengan teknologi internet dengan media dan informasi yang lebih cepat dan mudah. Dalam pola ini pemerintah serta juga kelompok masyarakat ataupun stakeholder membentuk sebuah komunikasi yang interaktif, bahkan hingga dengan sesama lembaga pemerintahan. Implementasi program e-Government dimulai dari beberapa layanan yang sederhana yakni bagaimana pemerintah menyediakan informasi dan sebuah data – data dengan computer sebagai basis yang kuat untuk menjadi sebuah alat bantu pemerintah dalam membantu pemerintah itu sendiri untuk mewujudkan sebuah keterbuakan (transparansi).

Tak hanya dari kalangan masyarakat yang biasa namun juga kalangan perangkat Daerah atau (SKPD). Mereka bisa mengakses informasi melalui berbagai macam media seperti e-mail, facebook, twiter, Instagram dan WEB resmi dari pemerintah itu sendiri. Mustopadidjaja dalam (Tahir, 2014 : 21) Menjelaskan bahwa kebijakan biasanya dijadikan kata ganti dari sebuah kegiatan Pemerintah dan juga menjadikan suatu symbol prilaku dari lembaga negara yang nantinya kebijakan tersebut akan ditulis dalam berbagai bentuk perturan. Carl J Federick dalam (Agustino, 2008 : 7) mendefinisikan bahwa kebijakan Pemerintah merupakan kegiatan yang memang direncanakan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang dimana mereka menyadari bahwa terdapat hambatan -

hambatan yang terjadi serta menyadari adanya kesempatan terhadap pembuatan kebijakan tersebut serta memiliki pencapaian tertentu.

Perencanaan Komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Perencanaan komunikasi merupakan sebuah konsep komunikasi yang berasal dari kata perencanaan dan komunikasi. Dengan demikian sebuah konsep ini merujuk pada dua konsep dasar, dan keduanya memiliki arti lain namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari kata perencanaan, berarti dapat diartikan sebagai manajerial, sedangkan arti kata komunikasi merujuk pada sebuah proses penyebaran informasi. Jadi dari perencanaan haruslah berpatokan dengan adanya kebijakan yang telah diberikan.

Hal ini dilakukan karena mencegah kemungkinan sebuah perencanaan yang melenceng dari apa yang sudah disampaikan. Karena itu mengapa perencanaan komunikasi harus melihat sebuah aspek dari kebijakan komunikasi atau aturan – aturan yang memang dibuat untuk menjalankan sebuah program dari lembaga yang berkaitan.

Maka tidak begitu heran ketika perencanaan merupakan sebuah kajian dalam bidang disiplin ilmu komunikasi dengan alasan mendasar yang terdapat didalam sebuah perencanaan tersebut. Menurut para ahli seperti yang dikatakan menurut Koontz dan Weirich dalam (Solihin, 2012 : 6) perencanaan merupakan suatu proses yang mengutamakan tujuan – tujuan perusahaan dengan cakupan terperinci, dan kemungkinan mengenai sebuah lingkungan dimana berkaitan dengan sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana suatu perusahaan merumuskan berbagai rencana atau agenda yang diperlukan merupakan sebuah tahapan pengoreksian dan mengetahui kekurangan.

Sistem Komunikasi Dalam Mendukung Realisasi Program.

Sistem adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang nantinya menjadi berhubungan antara satu dengan yang lainnya tujuannya antara lain tidak lain adalah memudahkan informasi, materi dan energi. Pendapat lain juga di tuangkan dalam Menurut (Jogiyanto, 2009: 34)

“Sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen “.

Sistem juga merupakan satu kesatuan yang ada keterkaitannya dengan wilayah serta item penggerak, sebagai contoh dimana Yogyakarta merupakan sebuah provinsi, namun Yogyakarta adalah gabungan antara berbagai kabupaten seperti Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, dan juga Yogyakarta. Beberapa elemen dari Kabupaten tersebut merupakan elemen - elemen yang menjadi satu.

Kata sistem juga tidak hanya untuk satu arti namun banyak hal yang bisa menggambarkan dengan kata sistem sendiri. Sementara itu komunikasi adalah suatu pertukaran pesan atau informasi atau materi yang dilakukan oleh komunikator atau yang berbicara dengan komunikan atau yang mendengarkan atau menerima pesan.

Dalam mensukseskan program e-Gov ini selalu ada hal yang penting dalam menjadikan kegiatan itu ter-realisasi. Bagaimana sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mensukseskan program kerja pemerintah. Untuk itu perlunya upaya dalam meningkatkan kapasitas dan juga penataan untuk menunjang pengembangan e-Government.

Strategi komunikasi dalam implementasi program.

Strategi komunikasi merupakan sebuah cara dalam melaksanakan kegiatan secara efektif untuk dapat menentukan keberhasilan komunikasi tersebut. Menurut Smith dalam (Pratiwi, 2012 : 12) mengatakan

“Strategic Planning For Public Relation”

Merupakan sebuah kampanye komunikasi dengan sifat informal dan juga persuasif dalam membangun sebuah pemahaman dan dukungan terhadap sebuah ide, gagasan atau produk yang terencana yang dilakukan dengan berorientasi laba atau nirlaba dengan tujuan, rencana dan berbagai alternatif berdasarkan sebuah riset dan evaluasi. Dalam menilai suatu proses komunikasi dapat dengan menggunakan model – model komunikasi. Nantinya dalam sebuah keberhasilan komunikasi terutama melihat dari segi efek dan proses komunikasi tersebut dan ditelaah dengan model komunikasi. Menurut Effendi dalam (Pratiwi, 2012) mengatakan :

“strategi komunikasi merupakan sebuah pedoman dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan”.

E. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu dari unsur penting dalam menjaga sebuah validitas dari sebuah hasil penemuan dari penelitian. Selain itu, (Sugiono, 2012 : 9) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan kondisi suatu objek yang alamiah dengan seorang peneliti sebagai sebuah instrument penting. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, tujuan penelitian merupakan sebuah cara yang dipergunakan untuk memecah sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dan sebagai langkah awal yang ditempuh dalam sebuah penelitian mewajibkan relevansi dari masalah dan juga rumusan masalah.

Dalam sebuah penelitian, pendekatan yang peneliti gunakan adalah sebuah cara dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan deskripsi yang menjadi cara penulis untuk menjelaskan kepada sang pembaca. Metodologi ini yang digunakan oleh penulis untuk memecah permasalahan yang ada dipelaksanaan program kerja humas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai penulis, penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang mendorong bagaimana situasi yang sedang berlangsung. Dalam pendekatan tersebut terdapat upaya dalam mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, dan menginterpretasikan sebuah pendapat dan kejadian yang sedang berlangsung.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dengan Objek penelitian membahas tentang strategi komunikasi e-government pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Lokasi yang peneliti akan kunjungi adalah kantor dinas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan waktu kunjungan pada September 2017.

Narasumber Penelitian

Narasumber yang menjadi objek dari bagian penelitian ini adalah staff dan kepala bidang Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan program e-Government kepada masyarakat.

Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang saat ini penulis gunakan merupakan terusan dari pendekatan penelitian. Jenis dari penelitian menggunakan data – data lapangan, adapun teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini akan didapat melalui wawancara mendalam terhadap pihak yang nantinya akan diwawancarai, dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utarayang nanti kemudian akan ditambah seebuah hasil Observasi langsung lapangan selama beberapa hari atau beberapa waktu.

b. Data Sekunder

Data sekunder nantinya akan diperoleh dengan sebuah cara kajian dokumen atau data file yang dapat memperkaya sebuah informasi dalam penelitian ini. Data sekunder seperti data dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Tenik Pengupulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengembangan dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam eksekusinya nanti penulis ingin melakukan wawancara mendalam tidak terstruktur. Secara lebih jelas dalam memperoleh data yang dimau dan sumber sendiri akan merasa nyaman dalam mengungkapkan pendapat dan ide-idenya.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah dari peneliti yang akan digunakan dalam praktek lapangan nanti. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam pelaksanaanya penulis terlebih dulu sudah melakukan negosiasi dalam memberitahu akan adanya pelaksanaan riset kepada sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memperlihatkan sumber-sumber yang memiliki data dengan alasan data yang dimiliki dapat digunakan dalam memperluas data –data yang telah ditemukan. Adapun sebuah dokumen yang

peneliti gunakan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan arsip institusi yang berhubungan langsung dengan focus penelitian.

Analisis Data Hasil dan penelitian

A. ANALISIS KEBIJAKAN KOMUNIKASI

1. Konsep dan tujuan kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi mengharuskan sebuah organisasi untuk tetap taat pada sebuah aturan yang dijalankan, karena sejatinya kebijakan komunikasi dibuat untuk dapat menjadi sebuah pedoman dan fondasi bagi sebuah organisasi swasta ataupun organisasi negara. Kebijakan komunikasi juga merupakan awal dari sebuah aktivitas komunikasi sebelum adanya perencanaan komunikasi dan strategi atau implementasi yang akan ditentukan.

Dalam kebijakan yang telah dibentuk dan dirumuskan tersebut dari masing – masing peraturan yang sudah diresmikan dan dijalankan untuk nantinya menjadi pedoman dalam praktek. Praktek yang telah di jalankan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada sumber kebijakan Pemerintah, misalnya dalam pelayanan informasi yang ingin didapat oleh seseorang, Diskominfo selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan terus berusaha mengikuti prosedur dalam pelaksanaannya dan tidak membuat pelayanan menunggu lama dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan yang ingin di dapat oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memang memberikan kemudahan birokrasi.

2. Analisis sumber daya manusia dalam proses pembentukan kebijakan komunikasi

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting yang terdapat dalam kebijakan komunikasi terlebih lagi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat vital dalam keberlangsungan kebijakan tersebut. Permasalahan yang dapat di akibatkan dalam kurangnya sumber daya manusia yakni kebijakan dalam mendayagunakan suatu infrastruktur komunikasi yang berbentuk seperti komunikasi massa ataupun komunikasi antarpribadi yang semuanya tergantung pada sumber daya manusia yang mengoptimalkannya.

Dalam penemuan dari hasil wawancara dan juga observasi yang didapat dari Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat sebuah

kesenjangan keilmuan dan pengetahuan dalam elemen sumber daya manusia. Terlebih lagi aparaturnya daerah atau SKPD merupakan garda terdepan dalam mensukseskan kebijakan komunikasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

3. Analisis sosialisasi kebijakan komunikasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang bersifat mempelajari suatu kebiasaan – kebiasaan dengan meliputi cara – cara hidup. Dikutip dari (Sari, 2009 : 92) menyatakan sosialisasi adalah suatu proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, aturan, norma dari satu generasi ke generasi lainnya yang meliputi semua komponen masyarakat. Sosialisasi dimulai dari sebuah interaksi sosial secara langsung ataupun interaksi secara tidak langsung. Dalam prosesnya sosialisasi dapat berlangsung dengan melalui kelompok sosial, seperti keluarga, sekolah, lingkungan kerja, lingkungan bergaul ataupun media massa.

Dalam temuan dilapangan peneliti mendapatkan data pada persoalan sosialisasi yang mengharuskan setiap organisasi pemerintah atau swasta agar dapat menunjang semua program yang ingin dijalankan. Pada data yang peneliti temui dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara sudah didapati adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Analisis SOP yang mendasari lahirnya kebijakan komunikasi

SOP atau standar operasional prosedur merupakan salah satu landasan atau bila diartikan dengan mudah yakni tatacara dalam membuat suatu kegiatan seperti membuat kebijakan, kegiatan, infrastruktur dan lain – lain. Didalam SOP dapat digambarkan dengan jelas bagaimana langkah – langkah dalam mengelola suatu kegiatan sekaligus memberikan gambaran peranan atau personil pejabat yang melakukannya pada tiap tugas – tugas yang disebut. SOP juga dapat mengurangi proses kerja yang pada akhirnya bermuara pada birokrasi yang panjang dan berbelit – belit agar segera bisa di sederhanakan.

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh, Dinas Komunikasi Dan Informatika serta Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara selaku penyelenggara. Pemerintah telah melakukan dan sedang menjalankan program sesuai dengan SOP yang berlaku dan merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika. Hal ini didasari oleh fakta

pada pembuatan atau perumusan kebijakan yang menggunakan pedoman atau SOP dari Menti Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Dalam hal lain seperti langkah – langkah atau cara mensukseskan program perumusan kebijakan ini juga berlandaskan dengan SOP yang berlaku hingga saat ini.

5. Riset dan evaluasi dalam penganangan kebijakan komunikasi E-government

Tahapan dalam membangun kebijakan yang tepat selanjutnya adalah evaluasi dan riset. Kemajuan zaman seolah – oleh membuat kita tidak pernah terbebas dari pola yang sangat konsumtif. Kemajuan teknologi tidak bisa kita permasalahan karena memang hakikatnya setiap tahun pasti terdapat perubahan teknologi serta kemajuannya. Karna kemajuan teknologi itulah teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dari sanalah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan sebagai hasil dari rumus – rumus dan juga teori yang dapat menjadi instrument paling penting di zaman yang modern ini. Maka jangan ragu jika ilmu pengetahuan akan berjalan seiring perkembangan teknologi.

Evaluasi kebijakan bertujuan agar mencari suatu nilai dari persoalan dan menemukan sebuah solusi yang dapat disempurnakan. Evaluasi juga merupakan sebuah proses analisis yang menekankan pada sebuah penciptaan nilai dari penilaian terhadap rumusan kebijakan atau program kebijakan. Seperti yang di katakana oleh Dye dalam (Parsons, 2008 : 35) menyatakan evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pemerikassan yang objektif, sistimatis, serta empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap target suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang ingin dicapai.

B. ANALISIS PERENCANAAN KOMUNIKASI

1. Komunikator dalam perencanaan komunikasi terhadap program sosialisasi E-government

Dalam merancang sebuah perencanaan komunikasi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan setelah adanya kebijakan komunikasi yang telah dibuat. Beberapa hal yang penting saat merancang sebuah perencanaan komunikasi yakni pentingnya komunikator sebagai pengantar atau penyambung pesan kepada komunikan, yang dimaksud komunikan sendiri yakni seseorang atau kelompok yang mengkomsumsi pesan dari komunikator.

Dalam tugasnya komunikator yang telah dipilih dari pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas untuk mengidentifikasi sasaan yang akan dituju dalam pesan tersebut. Dalam hal lain komunikator juga bertugas untuk melakukan perancangan pesan agar nantinya pesan yang disampaikan dapat langsung mudah difahami oleh komunikan, komunikator juga memiliki tugas penting untuk menentukan sebuah metode dalam penyebaran pesan nantinya metode yang digunakan dapat memudahkan komunikator dalam melakuigunakan dapat memudahkan komunikator dalam melakukan tugasnya.

2. Perencanaan pesan dalam program E-government

Pesan merupakan sebuah informasi yang nanti disampaikan oleh seseorang dalam bentuk sebuah symbol yang memiliki persepsi dan dapat diterima dimasyarakat dalam kemajemukan makna. Pesan juga dapat diartikan hal yang disampaikan oleh komunikator dalam cara berkomunikasi Penyampaian pesan memilki dua acara penyampaian yakni penyampaian pesan yakni pesan verbal adalah pesan yang disampaikan secara langsung dengan menggunakan bahasa, bahasa sendiri merupakan kumpulan dari berbagai macam kata – kata yang disatukan menjadi paragraph dan dijadisatukan lagi menjadi bahasa atau kalimat yang tentu memilki symbol dan arti. Cara yang kedua adalah penyampaian pesan secara non verbal yakni penyampaian bahasa yang menggunakan isyarat seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh dan lain sebagainya.

Sejalan dengan data – data yang didapat oleh peneliti, konsep dalam merencanakan sebuah pesan berserta bagaimana pesan yang akan dipublis sejaln dengan teori yang ada. Dalam teori perlu adanya pesan Informatif, edukatif, dan persuasive akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. dari peneliti berpendapat agar pesan yang nantinya akan disampaikan bisa benar – benar tertuju pada sasaran yang mengkomsumsinya.

3. Perencanaan saluran atau media yang akan digunakan dalam aktifitas komunikasi E-government

Perencanaan media adalah sebuah aktivitas yang sangat penting dalam hal promosi serta kegiatan publikasi. Dan memang sering kali ditemukan sebuah aktifitas promosi atau publikasi yang kurang dan terkesan menghambur hamburkan anggaran serta tidak memiliki benefit yang diinginkan. Guna dari sebuah perencanaan media tidak lain

tidak bukan untuk mengasikkan sebuah komunikasi secara baik dan menadapatkan perhatian secara besar dikhalayak atau masyarakat.

Dalam analisis penelitian yang dilakukan di Kabupaten Penajam paser Utara, peneliti melihat tepatnya Pemerintah menggunakan sebuah media dalam penyampaian pesan. Kabupaten penajam paser utara sendiri merencanakan penyaluran pesan akan dilaksanakan atau disampaikan melalui banyak media contohnya web, Instagram, facebook, baliho, sepanduk dan media luar ruang lain hal ini dilakukan karena memperkirakan efektifitas media luar ruang yang semakin menarik dan murah.

4. Perencanaan komunikan sebagai sebuah target program E-government

Pada saat melakukan sebuah komunikasi atau melakukan sebuah aktivitas mengelola dan menerima pesan komunikan merupakan actor dari sebuah proses komunikasi itu. Komunikasi memang diperlukanya seorang komunikator atau penyebar berita dan pesan namun perlu diingat bahwa ada komunikan yang akan menentukan sebuah keberhasilan suatu pesan tersebut. Komunikan adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan atau informasi dari komunikator melalui berbagai macam media dan saluran. Komunikan dapat dikatagorikan seperti hanya media atau saluran.

Namun peneliti mendapati kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan dengan sasaran atau komunikan yang ingin dicapai dalam data yang didapat menunjukan bahwa Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara belum lebih sepesifik terhadap pesan yang akan disampaikan kepada khalayak dikarenakan Kabupaten Penajam masih belum mengklasifikasi usia dan pekerjaan para komunikan yang akan diberikan informasi tersebut membuat pesan yang disampaikan terkesan sangat umum dan belum bisa menjamah para sasaran seperti anak sekolah, remaja akhir, dan orang tua.

5. Perencanaan sebuah feedback dimasyrakat oleh program e-Government

Berbicara sebuah layanan berarti kita juga membicarakan adanya feedback. Adanya pesan yang ditulis atau disajikan lewat bermacam media memastikan adanya sebuah feedback. Feedback sendiri memiliki adalah sebuah tanggapan yang dilayangkan oleh komunikan atau khalayak kepada komunikator atau sumber pada sebuah pesan. Dalam feedback sendiri memuat berbagai macam pesan balik oleh komunikan atau khalayak, pesan tersebut dapat berupa tanggapan negative ataupun tanggapan yang positive.

Dalam pembahasan ini peneliti merasa bahwa rencana pengelolaan sebuah feedback yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat dikatakan tepat dalam menanggulangi adanya feedback yang memang disatu sisi bisa menjadikan bahan evaluasi atau bahkan bisa membuat suatu program dapat dikatakan gagal.

C. ANALISIS SYSTEM KOMUNIKASI e-GOVERNMENT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1. Analisis bentuk system komunikasi e-Government Kabupaten Penejam Paser Utara

Bentuk pola komunikasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia pola diartikan sebahai sebuah system atau tatacara kerja. Dalam literature lain yang lebih modern dinyatakan oleh Katz dan Khan dalam (Mulyana, 2013 : 174) mengartikan

“pola komunikasi sebagai keadaan atau urusan yang teratur mengindikasikan komunikasi yang dibangun antara anggota system tersbut dibatasi”.

Pentingnya suatu komunikasi tidak berdasar pada suatu ubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, namun juga komunikasi berperan penting bagi individu yang memiliki jabatan kepemimpinan dengan masyarakat disuatu lembaga institusi daerah. Teknik berkomunikasi yang menyebabkan itu menjadi lancar dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan bukan berdasarkan dengan keadaan ekomoni saja namun juga sangat tergantung pada pola komunikasi yang digunakan dalam organisasi atau lembaga guna menghubungkan antara kemauan lembaga atau masyarakat yang saling terhubung.

Dalam data yang sama peneliti mendapati keterangan bahwa seluruh pegawai negeri sipil yang berada diruanglingkup kantor dinas atau mereka yang bekerja untuk departemen – departemen yang ada dipemerintahan agar mengurus dan berpartisipasi dalam komunikasi terbuka salah satunya dengan mengurus komunikasi terbuka dalam bidang media massa berbasis internet seperti Web, dan media sosial yang lainnya. Serta teruntuk pegawai negeri sipil yang memiliki kulifikasi dalam mengatur pesan sandi agar dapat mempercayakan pesan tersebut dalam mengatur komunikasi yang tertutup.

2. Mejerial sumber daya manusia dalam system e-Government

Tindakan menejerial atau menejemen suatu hal merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari – hari mulai dari memenejerial jadwal, menejerial keuangan, menejerial waktu dan lain-lain. Dalam pembahasan ini peneliti akan membicarakan atau membahas tentang bagaimana disuatu system komunikasi dalam bidang program e-Government Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati adanya menejerial sumber daya manusia.

Hal ini juga masuk dalam poin dua pada konsep awal yang mengatakan bahwa melakukan rekrutment atau staffing. Temuan yang lain yakni ketika konsep awal mengatakan bahwa meningkatkan kualitas kerja, hal ini juga telah dilakukan oleh Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan kelimuan yang dimiliki oleh pegawai lembaga tersebut.

3. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara.

Pesatnya perkembangan zaman yang berimbas pada kemajuan suatu teknologi serta informasi dalam berbagai bidang, termasuk perkembangan infrastruktur jaringan komunikasi yang dimana semakin hari sebuah informasi atau berita sangat cepat didapat serta tidak mengenal waktu. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan cara bagaimana suatu daerah dapat memperbaiki proses ekonomi dan lembaga demi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera.

Hal yang kedua yakni infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat, yakni infrastruktur Wifi-cornner yang berada didepan kantor kecamatan Penajam. Peneliti mendapati bahwa pembangunan infrastruktur tersebut menemui kurnagnya pengoptimalan fungsi. Membangun infrastruktur juga harus melihat target sasaran serta tempat atau lingkungan sekitar, peneliti merasa pembangunan Wifi-cornner tersebut kurang tepat jika dibangun dan ditempatkan didepan kantor kecamatan Penajam, peneliti dalam observasi meilihat bahwa lingkungan disekitar tidak mendukung karena salain dimalam hari yang kurang dengan lampu yang menyala tempat tersebut sangat sepi dan kurang peminatan. Dari situlah kurang pemaksilan terhadap infrastruktur komunikasi dimasyarakat.

4. Standarisasi system komunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam progam kerja e-Government

Dalam bidang komunikasi yang berada pada suatu instansi atau lembaga daerah perlunya system komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental bagi kelangsungan komunikasi instansi dan lembaga tersebut. Pemanfaatan teknologi dan informasi di era sekarang ini menunjukkan bahwa komunikasi serta teknologi dapat menyentuh semua bidang tersebut, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan kesehatan.

Dalam penemuan data yang diperoleh dari peneliti terhadap objek instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjelaskan bahwa terdapat standarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wawarannya menyatakan bahwa terdapat standarisasi terhadap sistem komunikasi yang saat ini sedang digunakan sebagai unsur yang membantu suksesnya program kerja e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kerjasama dengan pihak luar dalam memenejerial system komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Suatu instansi atau lembaga akan berusaha keras dalam menjalin hubungan yang baik dengan khalayak luas atau publik, public sendiri bisa dibagi dengan public internal dan public eksternal atau biasa yang biasa kita dengar dengan sebutan stakeholder. Public internal juga bisa yang kita katakana dengan keluarga pada suatu lembaga atau instansi merupakan mereka yang bekerja seperti karyawan, keluarga karyawan, dan investor.

Peneliti melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika sudah tepat dalam melakukan kerjasama oleh pihak luar dalam membantu melakukan pekerjaan manajemen sistem komunikasi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dilakukannya kerja sama ini merupakan bentuk dari perhatian khusus Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam manajemen sistem komunikasi yang tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang keberlangsungannya program kerja e-Government.

D. IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI E-GOVERNMENT

1. Penerapan komunikator bersama program e-government

Komunikator merupakan sumber dari adanya informasi yang tersebar dihalayak luas. Komunikator juga memiliki peran yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat atau komunikasi terhadap suatu hal yang dirasa memiliki keterkaitan dengan komunikator. Pemilihan komunikator merupakan faktor penentu keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada komunikasi atau masyarakat. Hal ini dikarenakan komunikator menjadi satu sorotan komunikasi terhadap beberapa pesan yang ia sampaikan. Diawal pembahasan pada unsur perencanaan komunikator didapati beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh komunikator.

Peneliti mendapati implementasi dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan komunikator. Dalam implementasi pemerintah sadar akan pentingnya komunikator yang berimbas pada lembaga itu sendiri. Dibuktikan pada berita yang dimuat dari bagaimana media tersebut memberitakan bahwa Pemerintah membuat suatu program baru yakni pelayanan informasi yang diberi nama Silayan Adu

Peneliti merasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah baik dalam melakukan pemilihan komunikator, dengan memilih sesuai dengan klasifikasi. Peneliti juga melihat dalam pemilihan komunikator tidak hanya akan dipilih sumber berdasarkan status jabatannya, melainkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat memilih komunikator seperti pegawai yang memang memiliki keterkaitan dalam suatu informasi yang akan dibahas dalam suatu pemberitaan.

2. Penulisan pesan serta kualifikasi pesan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Pesan merupakan informasi yang dapat menjadikan suatu komunikasi dapat bereaksi atau memberikan respon terhadap suatu permasalahan dan juga isu. Pesan juga merupakan informasi yang dapat mempengaruhi komunikasi tertentu. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa pesan merupakan unsur terpenting dari sebuah komunikasi antara lembaga kepada masyarakat.

Pesan sendiri memiliki kualifikasi atau sifat, pesan dapat dibagi menjadi tiga sifat yakni pesan yang mengandung unsur edukatif, persuasif, dan informatif, pesan inilah yang dapat mendapatkan respon dari masyarakat.

Dalam penemuan data yang diambil dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didapati bahwa pesan yang akan dipublikasikan memiliki unsur kualifikasi tersebut,

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa pesan yang bersifat informative tersebut ditujukan pada khalayak agar membangun wawasan yang luas. Contohnya merupakan masih kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan pemda, nantinya secara singkat pesan akan ditulis dengan cara penyampaian di masyarakat yang moderen seperti sekarang, detidaknya itu yang dikatakn oleh Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan TIK Dan Pengembangan e-Government. Peneliti melihat bagaimana pesan yang dikelola serta dipublikasikan sudah baik, yang berarti pesan tersebut sudah memiliki sifat – sifat dasar dari suatu pesan seperti yang ada dikonsep awal.

3. Pemilihan media dalam implementasi e-Government

Media dalam komunikasi merupakan saran yang mendistribusikan pesan kepada khalayak luas. media juga bisa diartikan sebagai saluran dari suatu informasi dan pesan. Media sendiri memiliki banyak tipe dan pilihan diantaranya media cetak, media elektronik, dan serta adanya media baru atau internet. Dalam data yang diperoleh peneliti dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan hasil dan emenyatakan bahwa Pemrintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam implementasinya menggunakan berbagai macam media seperti media baru yakni internet Pemerintah Kabuapten Penajam Paser Utara menggunakan platform Web, Instagram dan Facebook untuk menarik para anak muda milenial yang dizaman sekarang aktif dalam menggunakan media sosial. Untuk urusan media cetak atau media luar ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara menggunakan media seperti baliho, spanduk, dan vidiotron bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat tersebar keseluruh pelosok daerah yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisis peneliti menyataka bahwa tindakan pemilihan media sudah berjalan dengan baik dan benar, melihat dari banyaknya media yang menjadi bahan untuk menyampaikan pesan. Media yang digukan juga tergolong murah dan terjangkau terlebih lagi pemanfaatan internet di era digitalisasi selaknya digunakan dalam membantu proses program kerja e-Government.

4. Komunikan dan implementasinya

Komunikan merupakan masyarakat yang menerima dari sebuah pesan yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok. Komunikan juga merupakan individu atau

kelompok yang menerima serta akan memberikan suatu respond dalam dunia komunikasi respond tersebut dinamakan feedback

Dalam data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara didapati bahwa konsep dan komunikasi yang telah diterapkan menjadi satu sasaran, Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri berkaitan dengan program kerja e-Government yakni memberikan informasi kepada sebagian masyarakat yang dirasa memang membutuhkan informasi tersebut, sama halnya jika informasi yang akan dipublikasikan kepada kelompok tertentu maka kelompok tertentu itulah yang akan menerima pesan dan informasi tersebut.

Analisis penelitian terhadap komunikasi memang sangat membutuhkan waktu pasalnya dilihat dari konsep awal yang mengatakan bahwa adanya komunikasi pasif dan aktif merupakan hal yang menjadi pekerjaan rumah kita semua terutama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan program kerja. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara seharusnya menjadikan komunikasi yang pasif menjadi aktif agar bertujuan dalam melakukan program selanjutnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak didapati kendala dalam masalah yang ada dimasyarakat.

5. Implementasi pengelolaan feedback masyarakat terhadap program e-Government

Respon atau feedback yang dikeluarkan oleh masyarakat sejatinya merupakan tanggapan langsung dari masyarakat terhadap apa yang didapati dalam suatu pesan. Feedback sendiri merupakan balasan pesan dari komunikasi dari suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator. Feedback juga memiliki kualifikasi yakni feedback dapat berupa respon positif atau respon yang negative. Dalam setiap program kerja terutama program kerja pemerintah yang dilakukan pasti didapati feedback. Harold Laswell dalam (Mulyana, 2007 : 69-71) menyatakan bahwa komunikasi dari sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator nantinya diharapkan memberikan sebuah efek atau feedback dari seorang komunikasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai komunikator memang harus siap dalam merespon feedback yang diberikan oleh masyarakat agar bertujuan dapat memberikan solusi atau pengertian kepada masyarakat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Namun terdapat beberapa hal yang kurang bagi peneliti ketika mengunjungi Web Pemerintah dan membaca berita yang ada, namun terlihat dari kolom komentar tidak didapati feedback apapun terhadap pesan yang diberitakan dalam platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurang feedback yang diberikan masyarakat dalam platform tersebut. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memaksimalkan media serta bagaimana cara mencari perhatian masyarakat dengan adanya indikasi feedback yang diberikan di platform tersebut.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai “strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan perencanaan program kerja e-Government” dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan strategi komunikasi dalam hal ini menyangkut dengan program kerja e-Government dengan mengklasifikasi unsur komunikasi seperti kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, system komunikasi, dan implementasi.

1. Kebijakan komunikasi

Dalam melakukan sebuah strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu. dalam membuat perencanaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempertimbangkan kebijakan – kebijakan dalam merencanakan program tersebut. Kebijakan yang ditaati dalam merancang sebuah program dibutuhkan karena mengingat adanya batasan – batasan yang harus dipenuhi.

2. Perencanaan Komunikasi

Bagian pertama yakni perencanaan komunikator. Dalam pemilihan komunikator Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kualifikasi tersendiri yakni komunikator harus memiliki Kredibilitas, Attractive, dan Power. Kualifikasi ini yang dapat seseorang di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi komunikator. Bagian kedua yakni pesan, perencanaan pesan yang digunakan dalam melakukan aktivitas komunikasi juga memiliki kualifikasi pesan. Seperti halnya komunikator pesan juga harus mengandung unsur yakni Informatif, edukatif, persuasive.

Dalam perencanaan pesan ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kualifikasi harus dilakukan menyangkut bahwa terdapat banyak berita yang harus dipilih dan dipilih oleh Pemerintah. Pesan verbal dan non-verbal dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Penajam Paser Utara juga digunakan. Bagian ketiga perencanaan media atau saluran, perencanaan media dan saluran ini merupakan unsur yang melandasi keberhasilan suatu pesan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perencanaan media seperti media baru yakni internet berbagai platform yang digunakan mulai dari situs Web, jejaring sosial facebook, Instagram dan email merupakan media yang berada pada media baru, sedangkan media luar ruang seperti baliho, video tron, dan spanduk merupakan media yang digunakan. Ada juga media yang digunakan sebagai pesan langsung yakni media tulis seperti surat. Bagian keempat perencanaan komunikasi, perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni masyarakat umum dan aparatur sipil. Bagian kelima perencanaan feedback, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perencanaan feedback dengan merespond secepat mungkin dan memperlakukan dengan baik.

3. Sistem komunikasi

Dalam penerapan sistem komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki bentuk atau pola komunikasi yakni terbuka dan tertutup yang digunakan hingga saat ini. Kemudian dalam manajemen sumber daya manusia sebuah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi aktifitas pegawai, pendampingan tenaga ahli untuk pegawai, dan peningkatan pengetahuan bagi pegawai. Sistem komunikasi juga menyangkut infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah membangun jaringan kabel FO atau fiber optic serta Wi-fi corner untuk masyarakat, juga menyangkut masalah standarisasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga menstandarisasi sistem komunikasi namun belum bertaraf internasional. Dan kerjasama stakeholder dalam membangun sistem komunikasi juga sudah dilakukan.

4. Implementasi strategi komunikasi

Pertama implementasi komunikator dalam bahasan sebelumnya kualifikasi komunikator yang harus ditemukan dalam setiap individu yang menjadi sumber sebuah pesan. Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan komunikator seperti Kepala Dinas

Komunikasi Dan Informatika yang menjadi komunikator serta adanya tokoh masyarakat seperti polisi serta individu yang terkait dalam suatu informasi yang ingin disampaikan. Kedua pesan yang dikirimkan juga sudah dilakukan sesuai dengan kualifikasi yakni edukatif, persuasif dan informatif salah satu contohnya yakni penyampaian pesan anti berita hoax yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Ketiga media dan saluran yang digunakan merupakan media yang memang pada saat ini sedang digunakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya yakni internet. Didalam internet tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan berbagai macam platform yakni situs Web, Instagram, facebook dan email. Sedangkan media luar ruang yang digunakan biasanya baliho dan sepanduk untuk video tron pemerintah masih belum memanfaatkan dengan baik. Keempat komunikasi dalam kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan informasi secara umum kepada masyarakat luas. Dan belum tertuju atau membentuk sebuah kualifikasi umur, gender, pekerjaan dalam membuat pesan. Kelima feedback, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan feedback terhadap komunikasi dengan cepat, baik dan sopan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto, HM. (2008). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mulyana, Deddy. (2013). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Prasojo Diat Lantip, Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Solihin, Ismail. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka.

Jurnal dan Skripsi:

Astutin, Sari. *Pengaruh Firm Size, Growth, Profitability, Business Risk Dan Tangible Asset, Terhadap Financial Leverage Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*". Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol.11, No.04, November 2009: 345-370.

Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web*, Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, 2010, ISSN 1414-9999.

Nur, Emilsyah. *Penerapan e-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu, Makasar*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 18 No. 3, Desember 2014: 265-280.

Oktavya, Aditya Ayu. *Penerapan (Electronic Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*. Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 3, Nomor 3, 2015: 1433-1447.

Pratiwi, Adelisa. (2012). *Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran Dalam Mengkomunikasikan Peraturan Dan Kebijakan Proses Perizinan Penyiaran (Studi Evaluasi Kementrian Komunikasi dan Informatika)*. Tesis. Fisip UI

Sitokdana, Melkior N. N. (2015). *Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*. Pascasarjana Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Identitas Penulis Pertama

Bintang Yusuf Wijaya

NIM 14321144

Grobogan, 11 Juni 1996

Ilmu Komunikasi/ Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Komunikasi Strategis

Jalan Provinsi Km 15 Penajam Rt 12 Rw 04 Kel Girimukti, Kec Penajam, Kab
Penajam Paser Utara. Kodepos 76144 Kalimantan Timur

+62 813-9783-6115

Bintangyusuf11@gmail.com

Identitas Penulis Pertama

Mutia Dewi S.Sos..M.I.Kom.

NIDN 0520028302

Staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII